

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2020**



**DINAS PPKBPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No.12 Kandangan 712111, Telepon/Fax (0517) 21556**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	17
3.3 Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKBPPPA) Tahun 2020 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari Misi dan Program dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2019-2023. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas PPKBPPPA Tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 ;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- t. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan serta merumuskan program pembangunan tahun

2020, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan strategi dan kebijakan perumusan program dilakukan melalui evaluasi pembangunan sosial tahun lalu, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu yaitu untuk tahun anggaran 2018 38 kegiatan yang direncanakan dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2018 :

**Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018**

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada SEKRETARIAT Termasuk Gaji, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kehormatan (Apabila Ada)

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Belanja Tidak Langsung				
	1. Gaji dan Tunjangan	1.740.634.000	1.508.137.374	86,64	100
	2. Tambahan Penghasilan	915.883.000	782.453.590	85,71	100
2	Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.217.000	2.076.500	93,66	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.880.000	54.714.935	91,37	100
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.800.000	8.921.400	64,65	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	10.037.500	10.034.083	99,97	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.300.000	8.300.000	100,00	100
	6. Penyediaan alat tulis kantor	23.570.300	23.570.200	100,00	100
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.621.840	9.611.400	99,89	100
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.887.000	1.885.000	99,89	100
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.811.000	34.810.000	100,00	100
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.640.000	2.215.000	83,90	100
	11. Penyediaan makanan dan minuman	16.220.000	16.220.000	100,00	100
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	259.093.000	259.047.452	99,98	100
	13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	33.250.000	29.950.000	90,08	100
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	95.554.650	68.387.640	71,5	100
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.423.400	69.229.000	99,72	100
	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	52.500.000	49.818.662	94,89	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.952.000	2.952.000	100	100
JUMLAH		3.499.463.862	3.090.250.320	88,31	100

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG KELUARGA BERENCANA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program keluarga berencana				
	1. Kegiatan Pembinaan keluarga berencana	300.346.820	284.720.000	94,80	100
	2. Kegiatan kemitraan antar lembaga dan institusi dalam pelayanan program Keluarga Berencana	15.700.000	5.520.000	35,16	100
	3. Kegiatan Pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan	7.670.000	4.765.000	62,13	100
	4. Kegiatan pembinaan institusi masyarakat dan petugas lini lapangan	13.501.000	13.501.000	100,00	100
	5. Kegiatan sarana dan prasarana pelayanan KB	711.000.000	692.826.200	97,44	100
	6. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana	3.059.340.000	1.072.325.770	35,05	95

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	penyuluhan dan penggerakan KB				
2	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR				
	1. Kegiatan forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah	17.611.100	17.031.100	98,86	100
	2. Kegiatan capacity building pendewasaan usia perkawinan	16.362.500	16.282.500	98,49	100
	3. Kegiatan temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja	11.855.000	11.175.000	96,78	100
	JUMLAH	4.153.386.420	2.118.146.570	50,99	99,44

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri				
	1. Kegiatan pembinaan kelompok ketahanan keluarga	115.944.860	111.218.560	96,67	100
	JUMLAH	115.944.860	111.218.560	95,92	100

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program peningkatan peran				

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				
	1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	11.988.000	11.988.000	100,00	100
	2. Kegiatan Pembinaan Desa P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	51.244.200	50.944.200	99,41	100
	3. Kegiatan Pembinaan KSI (Kecamatan Sayang Ibu)	17.360.000	17.360.000	100	100
	4. Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan	101.042.740	100.173.740	99,14	100
	5. Kegiatan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	107.566.640	105.524.000	98,10	100
	6. Kegiatan Pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak	54.156.480	53.434.200	98,67	100
	7. Kegiatan Peningkatan kapasitas perempuan	179.500.000	179.434.965	99,96	100
2	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak	16.940.000	16.940.000	100,00	100
	JUMLAH	539.798.060	535.799.105	99,26	100

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
	1. Kegiatan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan partisipasi anak	134.306.600	108.219.200	92,47	100
	2. Kegiatan pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak)	27.294.240	23.716.290	95,74	100
JUMLAH		161.600.840	131.935.490	81,64	100

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan Pada SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan jasa internet kantor.
- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 56 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD, telah berhasil melakukan penyediaan bahan pameran

- kandungan ekspo dan pawai pembangunan tahun 2018.
- e. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah melakukan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
 - f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
 - g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
 - h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.
 - i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
 - j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
 - k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
 - l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
 - m. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS
 - n. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil melakukan pemeliharaan gedung tempat kerja Dinas PPKBPPA.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil membayar BBM untuk 4 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 4 buah kendaraan dinas.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun.

II. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG KELUARGA BERENCANA

1. Program keluarga berencana
 - Kegiatan Pembinaan keluarga berencana, telah dilaksanakannya Pelayanan KB gratis secara keliling dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan KB, selain pelayanan menetap yang dilaksanakan di tiap-tiap Puskesmas di Kecamatan-Kecamatan serta Kegiatan Momentum yang berkaitan dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana, diantaranya Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan, Manunggal TNI – KB – Kesehatan, yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memacu capaian kesertaan ber KB dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kegiatan ditingkat lapangan.
 - Kegiatan pembinaan program KB pria untuk masyarakat pedesaan, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Kelompok Seminat dan Jejaring Akseptor KB Pria serta Temu Forum Pengelolaan Program KB Pria.
 - Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK Fisik), dilaksanakan pengadaan sarana KIE KIT Media Lini Lapangan, pengadaan proyektor LCD dan pengadaan Layar Proyektor LCD.
 - Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan pergerakan KB (BOKB DAK NON FISIK), dilaksanakan beberapa kegiatan seperti staff meeting/rapat teknis KKBPK, penyuluhan KKBPK, pertemuan kelompok kerja di Kampung KB, Forum Musyawarah tingkat desa Kampung KB, Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB, ketahanan keluarga berbasis kelompok Tribina, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan pemeliharaan Balai Penyuluhan KKB.

2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

- Kegiatan Forum diskusi terarah program kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah, telah dilaksanakannya Forum diskusi terarah Kesehatan Reproduksi Remaja yang merupakan media pendekatan persuasif, edukatif dan menggali pengetahuan para siswa sekolah lanjutan atas yang mengalami /mengarungi masa remaja. Forum diskusi terarah ini melibatkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Perwakilan BKKBN Provinsi KalSel.
- Temu pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, telah dilaksanakan kegiatan dengan melibatkan remaja dan orang tuanya.

III. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA SEJAHTERA

1. Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri

- Kegiatan Pembinaan kelompok ketahanan keluarga, telah dilaksanakannya Lomba Bina Keluarga Balita (BKB), Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR), Lomba Bina Keluarga Lansia (BKL), Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Lomba Keluarga Harmonis Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bimbingan Teknis Pusat Informasi dan Konseling Remaja baik Jalur Masyarakat maupun Jalur Pendidikan Tingkat Kabupaten di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Kandangan. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengertian PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, 8 (delapan) fungsi keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, seksualitas, Napza, HIV dan Aids dan bagaimana cara pengelolaan PIK Remaja itu sendiri serta Pendidikan Hidup kepada remaja yang bergabung dalam kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

IV. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Pembinaan Organisasi Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan hasil akhir yang didapatkan/diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas organisasi perempuan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Bimbingan Teknis Manajemen Kepengurusan Organisasi Perempuan dengan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan tujuan agar kepengurusan organisasi perempuan lebih terarah dengan adanya beberapa persyaratan, selain itu dilaksanakan juga kegiatan Pengembangan Administrasi Organisasi Perempuan.
- Pembinaan Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Pada tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi, pembinaan serta penilaian desa P2WKSS Tingkat Provinsi dan hasilnya untuk P2WKSS di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan meraih kategori Utama se Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI). Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan serta ada evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi di Kecamatan Daha Selatan dan hasilnya untuk Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kecamatan Daha Selatan meraih kategori Madya se Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peningkatan kualitas keluarga dan peran perempuan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi teknis penyaluran aspirasi perempuan, pelatihan sholat khusyu, rapat organisasi wanita, sosialisasi Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi organisasi Wanita, Kegiatan Safari Qur'an, pembinaan organisasi perempuan, Senam Massal anak, Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Pornografi, Sosialisasi Kepribadian Muslima, Seminar Persiapan menjelang Post Power Syndrome, Seminar pendidikan keluarga, Rapat Pembinaan

Organisasi, serta Kandangan Expo bagi organisasi wanita.

- Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Ceramah Kesehatan "Selalu Sehat, sukses dan bahagia menjalani hidup", Ceramah agama tentang hukum dan dampak nikah siri, penyuluhan pensiun sejahtera "Persiapan Pensiun dari sudut Pandang", rapat bulanan organisasi wanita, Keterampilan Merias Wajah, Keterampilan Pembuatan Bros Hiasan Hijab, Pelatihan Keterampilan Menghias Cake, Pelatihan Keterampilan Membuat Hantaran dari Kain/Tapir, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada remaja, Rapat bulanan Organisasi Wanita serta kegiatan lomba bercerita/Puisi anatar anak perwakilan OPD se Kab. HSS.
 - Pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak. Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga, Peran Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembinaan Kesehatan Lansia, Penyuluhan HIV AIDS dan Bahaya Pornografi pada anak, Penyuluhan Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Layanan dengan tujuan agar adanya pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga layanan Perlindungan perempuan dan Anak dari tindak kekerasan baik psikis dan seksual.
 - Peningkatan kapasitas perempuan. Kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM organisasi perempuan dalam peran sertanya di pembangunan, pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan wawasan Organisasi Wanita, Peningkatan Wawasan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Wawasan di Bidang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Pengembangan Sistem Informasi gender dan anak. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat validasi data terpilah baik tahap pertama berupa penjelasan mengenai pengisian data-data terkait profil data terpilah gender dan anak dan validasi data terpilah

tahap kedua dengan tujuan pengumpulan data-data yang telah dibagikan sebelumnya, selain itu ada pertemuan pengembangan data terpilah gender dan anak dengan tujuan pengembangan data tersebut untuk pembangunan berikutnya.

V. Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak. Pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti perkenalan permainan tradisional (Balogo, Egrang), Rapat perdana pengurus Forum Anak Daerah (FAD), Sosialisasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan & Desa, Latihan menyusun program kerja Forum Anak, Kegiatan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten, Kegiatan Deteksi Dini Kekerasan Terhadap Anak, Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Kegiatan bakti sosial Forum Anak Daerah (FAD), Jambore Forum Anak Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diisi dengan penampilan seni/ajang kreativitas dan yel-yel dari masing-masing kecamatan; kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak Daerah (FAD) dengan narasumber dari Provinsi dengan materi Peran FAD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, FAD sebagai Pelopor dan Pelapor (2P); kegiatan peningkatan SDM tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dengan materi Konvensi Hak Anak, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak.
 - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pada tahun 2018 ini ada pelaporan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 16 kasus dan 2 kasus terhadap perempuan. Semua kasus yang dilaporkan melalui P2TP2A telah diterima dan ditangani.

Tabel 2.2**Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN %
1.	Tingkat penurunan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Indeks	2,59	2,4	92,66
	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif	Persen	79,55	78,77	99,02
2.	Persentase rata-rata usia kawin pertama	Persen	51,00	49,17	96,41
3.	Persentase bina keluarga balita (bkb), bina keluarga remaja (bkr), bina keluarga lansia (bkl) yang aktif	Persen	50,68	52,02	102,64
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,59	61,10	94,59
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,25	89,07	98,69
6.	Persentase desa dan kelurahan Layak Anak	Persen	Madya	Pratama	0
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100
8.	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81,22	100,27
10.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		A	BB	0
11.	Persentase temuan BPK/Inspektort yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain berkaitan dengan semakin meningkatnya permasalahan perempuan dan anak yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Selain itu adanya perubahan SOTK dan mutasi pejabat yang menangani kegiatan (PPTK) juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

1. Belum sepenuhnya diberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Keluarga Berencana;
2. Ratio Tenaga PLKB sangat rendah;
3. Kurangnya penyebaran Data dan Informasi Kependudukan dan KB;
4. Belum optimalnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Belum sepenuhnya memberdayakan seluruh potensi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak;
6. Perubahan peraturan tentang syarat-syarat pelayanan atau pengklaiman akseptor dari BKKBN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Renja Tahun 2020 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
- Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
- Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- Penyusunan Dokumen Keuangan
- Penyusunan Dokumen AKIP

4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah :

- Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat
- Partisipasi Anak

5. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan :

- Pelaksanaan PUG di tingkat daerah

6. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan :
 - Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
7. Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak :
 - Pelayanan Pemenuhan Hak Anak
8. Program Peningkatan Perlindungan Anak :
 - Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak
9. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) :
 - Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana
10. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera :
 - Pembinaan kelompok ketahanan keluarga
 - Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan berwawasan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan;
- b. Sub Bagian Keuangan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- c. Sub Bagian Perencanaan melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan;
- d. Bidang Keluarga Berencana melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- g. Bidang Perlindungan Anak melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rancangan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan

Pada forum SKPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari desa. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2020 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2018–2023 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk,

- Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun Anggaran 2020;
 - c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
 - d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS;
 - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS Tahun 2020 mencakup 10 program dan 23 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			0			Non Urusan					
			0	0		-					
			0	0	7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP ; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	82,46 angka;100 Persen	9.610.000	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat AKIP	0.00.2.08.01.007.7			Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 laporan	4.700.000	-
			0.00.2.08.01.007.8			Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 laporan	4.910.000	-
			0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	595.906.900	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	Non Urusan					
			0.00.2.08.01.001.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	44.545.200	-
			0.00.2.08.01.001.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	63.600.000	-
			0.00.2.08.01.001.4	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	16.500.000	-
			0.00.2.08.01.001.6	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	28.104.000	-
			0.00.2.08.01.001.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	41.250.000	-
			0.00.2.08.01.001.9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	401.907.700	-
			0 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	250.256.000	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	Non Urusan					
			0.00.2.08.01.002.14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	88.736.000	-
			0.00.2.08.01.002.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	47.000.000	-
			0.00.2.08.01.002.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	106.220.000	-
			0.00.2.08.01.002.31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik	1 tahun	8.300.000	-
			0 0 10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	566.241.700	
			0.00.2.08.01.010.39	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Kabupaten	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	3 kegiatan	56.076.700	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	Non Urusan					
			0.00.2.08.01.010.40	Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	5 kegiatan	483.315.000	-
			0.00.2.08.01.010.41	Partisipasi Anak	Kabupaten	Jumlah kegiatan partisipasi anak	2 kegiatan	26.850.000	-
			1	Wajib					
			1 9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			1 9 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	52,63 Persen	29.999.800	
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.09.2.08.01.018.15	Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Kabupaten	Jumlah SKPD yang responsif gender	6 SKPD	29.999.800	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			0			Non Urusan					
			1	9	22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	12,43 Persen	18.542.500	
			1.09.2.08.01.022.1			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Kabupaten	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	8 Organisasi perempuan	18.542.500	-
			1	9	23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK		Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	55,56 Persen	85.724.100	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	1.09.2.08.01.023.2			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten	Jumlah indikator yang terpenuhi	15 indikator	85.724.100	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			0			Non Urusan					
			1	9	24	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	100 Persen	23.966.000	
			1.09.2.08.01.024.1			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Kabupaten	Jumlah PATBM desa yang aktif	6 buah	23.966.000	-
			1	16		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
			1	16	26	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan; Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	29,17 persen;79,29 Persen	354.424.300	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	0	Non Urusan					
			1.16.2.08.01.026.4	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)	Daha Selatan, Telaga Langsung, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado, Padang Batung, Angkinang, Simpur, Daha Barat, Sungai Raya	Jumlah Balai KKB Kecamatan	11 Balai KKB Kec	0	-
			1.16.2.08.01.026.7	Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Kabupaten	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	34.812 PUS	259.507.900	-
			1.16.2.08.01.026.8	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Loksado, Padang Batung, Simpur, Angkinang, Sungai Raya, Daha Barat, Telaga Langsung, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	11 Balai KKB Kec	0	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	Non Urusan					
			1.16.2.08.01.026.9	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Telaga Langsung, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado, Padang Batung, Simpur, Angkinang, Sungai Raya, Daha Barat	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)	26 Faskes KB	0	-
			1.16.2.08.01.026.10	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF)	Padang Batung, Angkinang, Simpur, Daha Barat, Sungai Raya, Daha Selatan, Telaga Langsung, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBPK dan program lainnya	22 Kampung KB	0	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			0			Non Urusan					
			1.16.2.08.01.026.11			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Sirih, Hamayung Utara, Bamban Utara, Malutu, Parigi, Telaga Sili Sili, Habirau, Bajayau Tengah, Loklahung, Pandan Sari, Taniran Kubah, Bumi Berkat, Amparaya, Kapuh, Sungai Raya Selatan, Wasah Tengah, Jelatang, Baruh Kembang, Padang Batung, Sirih Hulu, Tibung Raya, Haratai, Bangkau, Mandala, Paring Agung, Teluk Haur, Habirau Tengah, Bakarung, Loksado, Pandulangan, Taniran Selatan, Durian Rabung, Angkinang, Karang Bulan, Sungai Raya Utara, Jembatan Merah, Sungai Garuda, Tumbukan Banyu, Hariti, Banjarbaru, Mandala Murung Mesjid, Pasungkan, Halunuk, Balah Paikat,	Jumlah kader PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPK	148 kader PPKBD	0	-
Renja Tahun 2020 Dinas PPKBPPA						33	Longawang, Pandulangan, Tanjung Selor, Gambah Dalam, Angkinang Selatan, Karang Jawa, Pahampangan				

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	Non Urusan					
						Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBPK	589 kader Sub PPKBD		
			1.16.2.08.01.026.12	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	Kabupaten, Telaga Langsung, Angkinang, Daha Barat, Kandangan, Daha Selatan, Daha Utara, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kalumpang	Jumlah Media KIE terfasilitasi (22 Rumah dataku dan 3 media luar lapangan)	25 buah	0	-
			1.16.2.08.01.026.30	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kabupaten	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	370 orang	94.916.400	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
			0			Non Urusan					
			1	16	27	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK; Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	36,36 Persen;65,22 Persen	63.008.400	
			1.16.2.08.01.027.1			Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	Kabupaten	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang aktif	195 kelompok	41.302.600	-
			1.16.2.08.01.027.3			Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Kabupaten	Jumlah institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	4 instansi	21.705.800	-
										1.997.679.700	
								TOTAL			


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat. Dengan demikian *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan periode 2020, Rencana Kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS.

Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, 10 Juli 2019
Kepala Dinas PPKBPPPA

Drs. Hj. Is Susilastuti
Pembina Utama Muda
NIP. 19601219 198503 2 006

LAMPIRAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			0			Non Urusan								
			0	0										
			0	0	7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP ; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	81,46 angka;100 Persen	9.610.000		82,13 angka;100 Persen		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat AKIP	.00.2.08.01.007.7			Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 laporan	4.700.000	-	12 laporan	4.700.000	
			.00.2.08.01.007.8			Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	15 laporan	4.910.000	-	15 laporan	4.910.000	
			0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	595.906.900		100 persen		
			.00.2.08.01.001.1			Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	44.545.200	-	1 tahun	44.545.200	
			.00.2.08.01.001.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	63.600.000	-	1 tahun	63.600.000	
			.00.2.08.01.001.4			Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	16.500.000	-	1 tahun	14.000.000	
			.00.2.08.01.001.6			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	28.104.000	-	1 tahun	28.104.000	
			.00.2.08.01.001.8			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	41.250.000	-	1 tahun	45.850.000	
			.00.2.08.01.001.9			Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 tahun	401.907.700	-	1 tahun	403.333.650	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	250.256.000			100 persen		
			00.2.08.01.002.14			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	1 tahun	88.736.000	-		1 tahun	80.239.000	
			00.2.08.01.002.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	47.000.000	-		1 tahun	45.900.000	
			00.2.08.01.002.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 tahun	106.220.000	-		1 tahun	106.220.000	
			00.2.08.01.002.31			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik	1 tahun	8.300.000	-		1 tahun	8.300.000	
			0	0	10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 persen	566.241.700			84 Indeks		
			00.2.08.01.010.39			Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Kabupaten	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga	3 kegiatan	56.076.700	-		3 kegiatan	56.076.700	
			00.2.08.01.010.40			Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten	Jumlah kegiatan peran serta dan partisipasi masyarakat	5 kegiatan	483.315.000	-		5 kegiatan	483.315.000	
			00.2.08.01.010.41			Partisipasi Anak	Kabupaten	Jumlah kegiatan partisipasi anak	2 kegiatan	26.850.000	-		2 kegiatan	29.350.000	
			1			Wajib									
			1	9		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			1	9	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase SKPD yang menerapkan anggaran yang responsif gender	52,63 Persen	29.999.800			68,42 Persen		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pangarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	09.2.08.01.018.15			Pelaksanaan PUG di tingkat daerah	Kabupaten	Jumlah SKPD yang responsif gender	6 SKPD	29.999.800	-		6 SKPD	29.999.800
			1	9	22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan yang aktif	12,43 Persen	18.542.500			18,92 Persen	
			.09.2.08.01.022.1			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Kabupaten	Jumlah organisasi perempuan penyedia pelayanan perlindungan perempuan dibina	8 Organisasi perempuan	18.542.500	-		12 Organisasi perempuan	18.542.700
			1	9	23	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK		Tingkat pemenuhan aspek desa/kelurahan layak anak berbasis klaster	55,56 Persen	85.724.100			79,63 Persen	
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	.09.2.08.01.023.2			Pelayanan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten	Jumlah indikator yang terpenuhi	15 indikator	85.724.100	-		43 kluster	92.724.100
			1	9	24	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan oleh P2TP2A	100 Persen	23.966.000			100 Persen	
			.09.2.08.01.024.1			Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Kabupaten	Jumlah PATBM desa yang aktif	6 buah	23.966.000	-		8 buah	23.966.000

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	16		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
			1	16	26	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase organisasi yang menindaklanjuti kesepakatan pendewasaan usia perkawinan; Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	29,17 persen;79,29 Persen	354.424.300			50,00 persen;79,59 Persen	
3	Menurunnya usia perkawinan pertama usia < 20 tahun dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia < 20 tahun	.16.2.08.01.026.4			Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK Fisik)	Daha Selatan, Telaga Langsat, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado, Padang Batung, Angkinang, Simpuri, Daha Barat, Sungai Raya	Jumlah Balai KKB Kecamatan	11 Balai KKB Kec	0	-		11 Balai KKB Kec	0
			.16.2.08.01.026.7			Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana	Kabupaten	Jumlah PUS yang ber KB menggunakan alat kontrasepsi	34.812 PUS	259.507.900	-		35.012 PUS	259.507.900
			.16.2.08.01.026.8			Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NF)	Loksado, Padang Batung, Simpuri, Angkinang, Sungai Raya, Daha Barat, Telaga Langsat, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan	Jumlah balai KKB Kec. yang mendapat dukungan operasional keg. program KKBPK	11 Balai KKB Kec	0	-		11 Balai KKB Kec	0
			.16.2.08.01.026.9			Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan (DAK NF)	Telaga Langsat, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado, Padang Batung, Simpuri, Angkinang, Sungai Raya, Daha Barat	Jumlah faskes keluarga berencana yang mendapatkan bantuan alat dan obat kontrasepsi (Alokasi)	26 Faskes KB	0	-		26 Faskes KB	0

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			16.2.08.01.026.10	Operasional Penggerakan Program KKBP di Kampung KB (DAK NF)	Padang Batung, Angkinang, Simpur, Daha Barat, Sungai Raya, Daha Selatan, Telaga Langsung, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, Loksado	Jumlah kampung KB yang mendapat dukungan integrasi program KKBP dan program lainnya	22 Kampung KB	0	-		22 Kampung KB	0
			16.2.08.01.026.11	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK NF)	Sirih, Hamayung Utara, Bamban Utara, Malutu, Parigi, Telaga Sili Sili, Habirau, Bajayau Tengah, Loklahung, Pandan Sari, Taniran Kubah, Bumi Berkat, Amparaya, Kapuh, Sungai Raya Selatan, Wasah Tengah, Jelatang, Baruh Kembang, Padang Batung, Sirih Hulu, Tibung Raya, Haratai, Bangkau, Mandala, Paring Agung, Teluk Haur, Habirau Tengah, Bakarung, Loksado, Pandulangan, Taniran Selatan, Durian Rabung, Angkinang, Karang Bulan, Sungai Raya Utara, Jembatan Merah, Sungai Garuda, Tumbukan Banyu, Hariti, Banjarbaru, Mandala Murung Mesjid, Pandangan, Hutan	Jumlah kader PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBP	148 kader PPKBD	0	-		148 kader PPKBD	0
						Jumlah kader Sub PPKBD di desa yang mendapat dukungan program KKBP	589 kader Sub PPKBD				589 kader Sub PPKBD	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			16.2.08.01.026.12	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NF)	Kabupaten, Telaga Langsat, Angkinang, Daha Barat, Kandangan, Daha Selatan, Daha Utara, Loksado, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kalumpang	Jumlah Media KIE terfasilitasi (22 Rumah dataku dan 3 media luar lapangan)	25 buah	0	-		25 buah	0
			16.2.08.01.026.30	Revitalisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kabupaten	Jumlah remaja teradvokasi dan menerima Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	370 orang	94.916.400	-		383 orang	94.916.400
			1 16 27	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera		Persentase instansi KB yang menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi dan keterpaduan program KKBPK; Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	36,36 Persen;65,22 Persen	63.008.400			54,55 Persen;70,23 Persen	
			16.2.08.01.027.1	Pembinaan kelompok ketahanan keluarga	Kabupaten	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang aktif	195 kelompok	41.302.600	-		210 kelompok	41.302.750
			16.2.08.01.027.3	Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan Berwawasan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Kabupaten	Jumlah institusi KB yang melaksanakan KKBPK dan instansi yang terkait yang berkomitmen terhadap kependudukan	4 instansi	21.705.800	-		6 instansi	21.705.900
				TOTAL				1.997.679.700				2.001.109.100